



Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Taruna Christofer Simangunsong¹, Nur Hidayati Gultom², Rahmat Fikri³, Hansein Arif⁴

^{1,2,3,4}Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: tarunat66@gmail.com, nurh69303@gmail.com, fikriarahmat092@gmail.com, hanseinwijaya@unja.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-05-07 Revised: 2024-06-27 Published: 2024-07-03	Educational institutions help students maximize their potential. Certain meetings caused changes in schooling strategy in Indonesia to fail. If we want a strong generation that is able to compete with other countries and follow global trends, education in Indonesia must be immediately improved. This policy change is a challenge for education today. Policy changes will definitely have a big impact on education in schools. Whether it's enjoyable or not, teachers and students must be able to adapt to new education policies. (1) Studying education problems in Indonesia and (2) Studying changes in education policy in Indonesia. Literature study and literature review were used in this research.
Keywords: Problematic; Change; Education Policy.	
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-05-07 Direvisi: 2024-06-27 Dipublikasi: 2024-07-03	Institusi pendidikan membantu siswa memaksimalkan potensi mereka. Pertemuan tertentu menyebabkan perubahan strategi persekolahan di Indonesia gagal. Jika kita ingin generasi yang tangguh yang mampu bersaing dengan negara lain dan mengikuti tren global, pendidikan di Indonesia harus segera ditingkatkan. Perubahan kebijakan ini merupakan tantangan bagi pendidikan saat ini. Perubahan kebijakan pasti akan berdampak besar pada pendidikan di sekolah. Baik itu menyenangkan atau tidak, guru dan siswa harus dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan pendidikan yang baru. (1) Mempelajari masalah pendidikan di Indonesia dan (2) Mempelajari perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. Studi kepustakaan dan kajian pustaka digunakan dalam penelitian ini.
Kata kunci: Problematika; Perubahan; Kebijakan Pendidikan.	

I. PENDAHULUAN

Salah satu agen perubahan sosial (social agent of change) adalah pendidikan. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi pendidikan selalu ditujukan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menghasilkan orang Indonesia yang religius dan bermoral, mahir dalam pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian dan bertanggung jawab. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses menanamkan nilai-nilai yang akan memengaruhi kehidupan manusia dan memperbaiki nasib dan peradaban manusia. Tanpa pendidikan, manusia saat ini sama sekali tidak berbeda dengan manusia masa lalu; mereka masih sangat tertinggal dalam hal kualitas hidup dan proses pendidikan. Dengan kata lain, kemajuan atau kegagalan sebuah negara atau daerah ditentukan oleh sistem pendidikannya. Seolah-olah reformasi yang dilakukan di Indonesia menjadi titik terang yang akan membawa banyak perubahan pada kehidupan bangsa ini, terutama dalam hal pendidikan. Namun, pendidikan di Indonesia semakin menjadi masalah baru, dengan

munculnya ambiguitas di bidang pendidikan yang terus berlanjut.

Kondisi pendidikan yang ironis adalah tentang tujuan yang ingin dicapai pendidikan. Munculnya mitologi ruang pendidikan bersama dengan ritual pendidikan adalah salah satunya. Artinya, anak-anak dianjurkan untuk melakukan banyak ritual, termasuk berpartisipasi dalam kompetisi, memilih sekolah yang mereka sukai, mengumpulkan uang untuk "persembahan", memakai seragam baru, membeli ramuan buku paket baru, dan banyak lagi. Baharudin (2007) Pemerintah sebenarnya bertanggung jawab atas potensi anak-anak negara, tetapi pemerintah mempertahankan mitos pendidikan. Pemerintah dengan penuh keyakinan memilih posisi yang lebih berpihak pada orang-orang terpenting, yang menyebabkan lelang didirikan.

Secara umum, masalah pendidikan di Indonesia berpusat pada empat pilar krisis: kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen. Bersamaan dengan empat masalah sebelumnya, berbagai indikator dikemukakan. Analisis komparatif tambahan yang membandingkan situasi pendidikan di antara negara-negara Asia. Semua empat masalah pendidikan tersebut adalah masalah besar, mendasar, dan berbagai

dimensi, sehingga mencari solusi menjadi sulit. Kemudian Secara khusus, masalah pendidikan menjadi benalu dalam kemajuan pendidikan Indonesia di era global. Permasalahan pertama adalah kualitas pendidikan yang rendah. Ini disebabkan oleh implementasi pendidikan yang buruk. Menurut Idrus (2009), pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia belum optimal. Kedua, terlalu sedikit orang yang lulus dari SMP, SMA, dan SMK. Ketiga, terlalu sedikit orang yang memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi. Keempat, sistem pendidikan tidak efisien. Kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari dasar pendidikan, yaitu upaya untuk memanusiaikan anak-anak dan menyiapkan mereka untuk generasi berikutnya yang cerdas dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan analisis pustaka dengan tinjauan pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literature ilmiah secara sistematis pada artikel-artikel jurnal dan dokumen yang membahas secara signifikan dan berkaitan dengan tema penelitian ini. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membangun kesadaran akan pentingnya perubahan kebijakan. Kebijakan pendidikan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun dengan mempertimbangkan situasi aktual yang berubah-ubah adalah subjek yang menjadi perhatian. Keputusan ini dicapai melalui analisis karya para ahli pendidikan, yang juga dibahas dalam buku dan jurnal yang relevan. Jurnal dan buku tersebut digunakan sebagai acuan untuk menampilkan kebijakan pendidikan dengan memahami dan menganalisis, dan kemudian digunakan sebagai pokok pikiran untuk menjelaskan hal itu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kata "kebijakan" berasal dari bahasa Yunani, "Polis", yang berarti "kota". Dalam kasus ini, kebijakan berkaitan dengan konsep pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang diterima baik oleh lembaga maupun pemerintah untuk mencapai tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75). Kebijakan, menurut Abidin (2006:17), adalah keputusan pemerintah yang berlaku untuk semua orang. Kebijakan adalah aturan tertulis yang mengikat dan formal yang dibuat oleh organisasi untuk menghasilkan nilai baru bagi masyarakat. Anggota masyarakat atau organisasi akan menggunakan kebijakan sebagai referensi utama mereka dalam

bertindak (Dunn, 1999). Pada umumnya, kebijakan bersifat menyelesaikan masalah dan proaktif. Dibandingkan dengan peraturan dan hukum, kebijakan lebih fleksibel dan interpretatif. Namun, kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh", dan diharapkan dapat bersifat umum sambil mempertahankan ciri-ciri lokal. Kebijakan harus memberikan kesempatan untuk ditafsirkan sesuai dengan situasi khusus yang ada.

Menurut buku Ali Imron Analisis Kebijakan Pendidikan, kebijakan pendidikan termasuk dalam kebijakan negara. Carter V. Good (1959) mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan pada sistem nilai dan sejumlah penilaian faktor situasional. Untuk menjalankan pendidikan yang bersifat melembaga, prinsip-prinsip ini digunakan. Perencanaan ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan lembaga. Kebijakan publik lainnya, seperti kebijakan ekonomi, politik, internasional, dan juga keagamaan, sangat terkait dengan kebijakan pendidikan. Akibatnya, kebijakan pendidikan Indonesia tidak dapat bertahan sendiri. Kebijakan pendidikan dapat berubah saat kebijakan publik berubah. Kebijakan politik, baik di dalam maupun di luar negeri, biasanya mengikuti kebijakan pendidikan. Bahkan pergantian menteri dapat mengubah kebijakan lama. Tidak mengherankan bahwa kebijakan berubah seiring dengan pergantian menteri. Kami masih ingat masa-masa ketika PMP (sekarang PKN/PPKN) mengajar materi PSPB, yang tidak jauh berbeda dengan IPS sejarah.

Menurut William (2000), Kebijakan adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh individu, atau bahkan kelompok atau organisasi individu, untuk memecahkan masalah tertentu. Kebijakan juga didefinisikan oleh beberapa pakar lain sebagai suatu gabungan perencanaan yang menyiapkan sejumlah keputusan tentang apa yang harus dilakukan tentang tenaga, dana, dan waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Keputusan-keputusan ini dilakukan oleh pemerintahan, kelompok, pejabat, atau sekelompok aktor dalam bidang tertentu (wahab, 1997). Menurut Charles L. (1968), Kebijakan dan proses pengambilan keputusan sangat terkait karena keduanya menentukan pilihan yang tersedia. Hal ini sejalan dengan

pendapat Maskuri (Maskuri, 2017), yang menyatakan bahwa kebijakan adalah prinsip atau metode yang digunakan untuk dipilih selama tahap proses pengambilan keputusan. Menurut Nurkholis (2014), Keputusan yang dibuat oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu disebut kebijakan.

Penulis dapat mencapai kesimpulan dari berbagai interpretasi tentang kebijakan dari para ahli dan beberapa tokoh di atas bahwa kebijakan adalah sekumpulan aturan tertulis yang menjadi keputusan formal dalam domain organisasi dan mengatur tindakan atau perilaku seseorang agar tujuannya dapat menciptakan norma atau nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama bagi perilaku anggota lembaga dan masyarakat. Kebijakan adalah proaktif, solusi (resolusi masalah), dan interparatatif. Selain itu, diharapkan bahwa kebijakan akan berlaku untuk semua orang, tetapi tetap mempertimbangkan perbedaan lokal. Carter mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai berikut: "Penilaian sistem nilai dan berbagai faktor kebutuhan situasional yang dilakukan pada sebuah lembaga, yang dijalankan sebagai suatu perencanaan umum untuk menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya."

2. Perubahan Kebijakan Pendidikan

Sektor pendidikan adalah salah satu dari banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan Indonesia setelah era orde baru. Manajemen negaranya mengalami perubahan yang signifikan; sebelumnya, kekuasaan berada di pusat, sekarang didistribusikan secara desentralisasi. Perubahan manajemen yang dibuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia juga merupakan dasar dari perubahan ini. Menurut undang-undang dan Peraturan Pemerintah, yang merupakan konsekuensi logis dari pendidikan, otonomi dan jiwa harus diimbangi dalam manajemen sekolah. Perubahan paradigma dalam dunia pendidikan dimulai dengan penyesuaian ini. Paradigma baru akan mengambil alih paradigma lama, yang akan berdampak pada paradigma perencanaan pendidikan. Mangunwijaya (2007) mengatakan bahwa paradigma baru harus mengubah kebijakan pendidikan secara substansial dan implementatif. Ini diharapkan akan berdampak positif pada kemajuan sistem pendidikan Indonesia. Ini

tidak berkaitan dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pendidikan agar negara dapat mencapai tujuan kesejahteraan. Kebijakan pendidikan termasuk kurikulum. (Esmi, 2014) Kurikulum adalah alat pertama yang digunakan siswa untuk memulai pelajaran di sekolah, dan dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka. Hal ini berlaku untuk proses pembelajaran karena kurikulum memberikan arahan yang cukup rinci tentang tugas guru dan kepala sekolah dalam proses belajar mengajar (Ritonga, 2018). Kurikulum adalah bagian penting dari proses pendidikan dan merupakan komponen yang paling langsung mempengaruhi bagaimana dan apa yang diajarkan di sekolah. Kurikulum juga dapat berfungsi sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sebagai standar untuk pengajaran di semua jenis dan tingkat pendidikan. (Masyhud, 2014).

Selain itu, kurikulum sekolah di Indonesia sering diubah, dengan setiap perubahan melibatkan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Th 2012, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran supaya peserta didik dengan aktif mengembangkan kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, spiritualitas, kecerdasan, dan ketrampilan yang diperlukan untuk mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Mangunwijaya, (2007) Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu negara yang UUD-nya mencantumkan ketentuan pendidikan adalah Indonesia. Di bawah kepemimpinan saat ini, pendidikan akan menjadi salah satu fokus utama dalam proses program pembangunan ini. Ini akan menjadi salah satu sektor sasaran yang paling penting. Selain itu, berbagai perubahan telah dilakukan pada kebijakan pendidikan karena fokus utama ini. Perubahan dan pengembangan kebijakan pendidikan baru menunjukkan hal ini. Kebijakan pendidikan yang signifikan ini mencakup penghapusan Ujian Nasional (UN), perubahan kebijakan untuk membantu siswa miskin, penghentian sementara kurikulum 2013, dan program Indonesia Pintar.

Kebijakan pendidikan sering diperdebatkan, termasuk sekolah bertaraf internasional, Ujian Nasional (UN), kompetensi guru, sertifikasi guru, pendidikan gratis, dan biaya pendidikan. Jumlah masalah tersebut meningkatkan tingkat saling ketergantungan artifisial, dinamis, dan subjektif. Kebijakan yang akan dibuat akan dibentuk oleh banyaknya masalah yang dibahas. Selain itu, untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk diterapkan, masalah tersebut harus dianalisis secara menyeluruh. Pembelerkuan kebijakan strategis dan operasional biasanya dipengaruhi oleh masalah seperti ini. Menurut Arwildayanto (2018), Kebijakan yang dibuat berdasarkan pilihan yang tidak dapat diubah disebut kebijakan strategis. Meskipun demikian, kebijakan operasional berasal dari keputusan kebijakan yang relatif, yang dapat disesuaikan dengan situasi dan dinamika yang sedang berlangsung. Kebijakan pendidikan tidak selalu dibuat menjadi undang-undang selama proses pembangunan ini sebagai solusi untuk masalah yang sering terjadi. Sebaliknya, proposal kebijakan pendidikan biasanya dimaksudkan untuk membawa perubahan mendasar terhadap kebijaksanaan saat ini.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, kebijakan pendidikan Indonesia sering berubah. Selain itu, hasil pendidikan tidak sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, terutama di era globalisasi. Akibatnya, kebijakan pendidikan di Indonesia harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan modern. Menguasai teknologi adalah tuntutan zaman. Oleh karena itu, sangat penting untuk merevisi sistem kebijakan pendidikan untuk mengatasi berbagai masalah yang sering muncul. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi, di antaranya adalah

1. Kebijakan pendidikan akan selalu berubah sesuai dengan globalisasi.
2. Memberi pendidikan yang baik, fleksibel, berorientasi pada siswa, mengikuti kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, menghasilkan lulusan yang kompetitif, dan terus berinovasi; dan
3. Transformasi kurikulum pendidikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
4. Untuk memastikan bahwa para siswa memiliki kualitas yang cukup, tenaga pengajar harus tersedia.

Oleh karena itu, tidak ada yang jelas tentang hasil dari kebijakan pendidikan yang terus berubah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang kompetitif, mampu menerima perubahan, dan dapat beradaptasi dengan perubahan di era globalisasi.

3. Problematika Kebijakan Pendidikan

Apakah kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik atau sebagai bagian dari kebijakan publik adalah masalah penting yang harus dibahas dalam makalah ini. Problem ini menjadi penting karena berkaitan dengan bagaimana pendidikan diposisikan di antara sektor-sektor publik yang memerlukan pengelolaan yang serius, serta tingkat urgensi yang diperlukan pemerintah untuk memprioritaskan program pembangunan. Untuk menghindari bias dalam diskusi tentang masalah di atas, sangat penting untuk mendefinisikan kebijakan pendidikan dan kebijakan publik. Bagian sebelumnya membahas definisi kebijakan publik. Di sisi lain, Tilaar dan Nugroho (2008) mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari proses mengubah anak-anak menjadi manusia merdeka. Orang merdeka adalah orang kreatif yang hidup dalam budayanya. Mereka dibesarkan dalam kebiasaan yang membudayakan, hidup di dalamnya, dan menciptakan atau merekonstruksi budayanya sendiri.

Dalam situasi seperti ini, kebijakan pendidikan harus dilihat sebagai pengetahuan praktis di mana visi dan misi pendidikan mengakomodasi filsafat manusia, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan adalah pengejawantahan dari visi dan juga misi pendidikan berdasarkan filsafat manusia dan politik dalam konteks masyarakat politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

1. Dimensi Kepemimpinan

Menurut Tilaar (1990), sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan memang diarahkan dan disesuaikan dengan keinginan para penguasa. Pendidikan akan difokuskan saat penguasa membutuhkan kekuatan politik. Terlebih lanjut, kekuatan politik pendidikan dilihat sebagai alat yang digunakan untuk kepentingan beberapa kelompok yang berkuasa. Kepemimpinan seperti ini sangat berdampak pada dunia pendidikan,

di mana pedoman saat ini didasarkan pada instruksi atasan daripada profesionalitas. Hal ini menyebabkan pihak yang tidak bertanggung jawab berkelakuan buruk, yang dapat mengakibatkan penghapusan hak dan kewenangan profesional. Akibatnya, pendidikan menghasilkan individu yang tunduk, tidak berani, dan berpura-pura.

2. Kesenjangan Pendidikan

Melihat tuntutan dan tantangan dunia pendidikan kian hari kian kompleks, seiring dengan kompleksitas masalah kemasyarakatan, kita sangat berharap kepemimpinan yang baru ini akan melakukan transformasi pendidikan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan menuju ke arah yang lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa. Banyak masyarakat mendukung institusi pendidikan dengan harapan bahwa mereka dapat menangani berbagai masalah kehidupan yang semakin global. Kepemimpinan akan memengaruhi arah dan jenis transformasi pendidikan.

a) Sarana dan prasarana

Dalam proses pembelajaran, fasilitas sangat penting dan tidak boleh terhambat. Ini karena jika sarana dan prasarana terhambat, hal itu juga akan berdampak pada proses penyaluran ilmu kepada siswa. Kesesuaian sarana dan prasarana pendidikan dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan, sehingga anggaran pendidikan menjadi salah satu elemen yang mempengaruhi kesesuaian sarana dan prasarana. Sekolah perkotaan biasanya memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi daripada sekolah pedesaan. Akibatnya, ada perbedaan yang signifikan dalam kualitas pendidikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan. Hal ini mengakibatkan proses belajar dan mengajar tidak efektif.

Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh banyaknya sarana dan prasarana yang layak digunakan dan dapat menunjang proses pembelajaran. Dengan banyaknya sarana dan prasarana yang rusak, pembelajaran menjadi tidak efektif. Pemerataan pendidikan akan sangat penting. Salah satunya dapat mencapainya dengan

memberikan beberapa dana khusus untuk pengelolaan yang lebih baik.

b) Keterbatasan Teknologi

Keterbatasan dalam penggunaan teknologi menjadi hambatan dalam proses pembelajaran, khususnya bagi guru karena banyak guru yang tidak akrab dengan teknologi seperti guru yang lebih tua dan senior. Untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru, proses pelatihan seharusnya diberikan terlebih dahulu.

4. Solusi Problematika Kebijakan Pendidikan

Karena fakta di atas, sangat penting untuk melakukan upaya untuk memperbaiki masalah yang ada. Ada beberapa tawaran solusi yang tersedia: Pertama, Pemimpin berfungsi sebagai panutan dalam kehidupan bangsa, jadi pilihlah yang tegas, jujur, kiat, dan peduli terhadap bangsanya. Kedua, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan sistem pendidikan secara aktif, tidak pasif, dan efektif. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengubah sistem pendidikan, termasuk mengubah kebijakan secara otomatis, mengganti menteri, dan mengubah kurikulum berulang kali. Ketiga, menyediakan dana untuk peningkatan fasilitas dan prasarana sekolah. Siswa mendapat manfaat besar dari dana yang diberikan karena membantu meningkatkan dan meningkatkan pendidikan. Dana ini dapat digunakan untuk membeli buku, media pembelajaran, transportasi, dan pembangunan fasilitas sekolah. Keempat, memperbaiki kualitas guru. Tenaga kependidikan sangat berperan aktif dalam pembentukan sumber daya manusia yang inovatif dan berkualitas, sehingga diperlukan pengembangan dan kualifikasi guru yang memadai. Dan Kelima, siswa diberi pendidikan karakter. Karena ilmu tidak berguna tanpa perilaku yang baik, pendidikan karakter akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Pemerintah harus membuat program pendidikan yang menghubungkan moral dan pendidikan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

kesimpulan dari masalah penelitian dan penjelasan, yang akan digunakan sebagai referensi untuk kemajuan ilmu. Kebijakan pendidikan adalah rencana yang dibuat oleh sebuah pemerintahan sebagai tanggapan atas

masalah pendidikan dan berfungsi sebagai pedoman untuk bertindak, solusi, dan inovasi untuk mencapai visi dan misi sekolah. Perubahan kebijakan pendidikan yang silih berganti bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lulusan menjadi unggul dan dapat beradaptasi dengan perubahan di era globalisasi. Namun, hasilnya masih belum jelas. Keberhasilan pendidikan sangat dipengaruhi oleh banyaknya sarana dan prasarana yang tidak layak digunakan dan tidak dapat menunjang proses pembelajaran. Dengan banyaknya sarana dan prasarana yang rusak, pembelajaran menjadi tidak efektif. Karena peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kehausan bagi dunia pendidikan dan merupakan investasi untuk menghasilkan individu yang berkualitas, tantangan dan prospek bagi pemerintah adalah untuk menghasilkan sumber daya yang sesuai dengan tuntutan zaman. Berikut ini adalah solusi yang ditawarkan karena masalah kebijakan pendidikan itu sendiri: Pertama, Memilih pemimpin yang tegas, jujur, kiat, dan peduli terhadap negaranya. Kedua, Peran pemerintah harus dapat membuat sistem pendidikan berjalan aktif, tidak pasif, dan efektif. Ketiga, Memberikan kontribusi keuangan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Keempat, Meningkatkan kualitas guru. Kelima, Menanamkan pendidikan karakter pada siswa.

B. Saran

Penulis sangat berharap untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang loyalitas pemustaka atau pelanggan. Dengan bantuan kegiatan ini, kita dapat mengetahui faktor lain yang dapat mempengaruhi loyalitas pemustaka atau pelanggan. Penulis kemudian sangat berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam penelitian ini untuk menyelesaikannya.

DAFTAR RUJUKAN

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.

Emnis, A.M (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia, dalam jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan, vol. 03

Idrus, M. (2009). Metode penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama

Imron, Ali. 1995. Kebijakan Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Mangunwijaya, Forum. (2007), Kurikulum yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif, Cetakan Pertama, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Masyhud. (2014). Perubahan kurikulum di indonesia: studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan islam yang ideal. Raudhah, IV (1), 49-70.

Muhammad Ali. 2017. Kebijakan Pendidikan menengah dalam perspektif governance di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Nugroho, Riant, 2008. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo (Gramedia).

Ritonga, M. (2018). Politics and Policy Dynamics of Changing the Education Curriculum in Indonesia until the Reformation Period. Bina Gogik, 5(2), 1-15

Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R dan Nugroho, Riant, 2008. Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Warassih, Esmi. (2011), Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV6.